

PENANGANAN MASALAH SOSIAL KHUSUSNYA PERMASALAHAN ANAK DAN PEREMPUAN KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017

Koesriwulandari

wulandari_uwks@yahoo.co.id

Dosen Program Studi Agribisnis

Fakultas Pertanian

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

ABSTRAK

Judul Kajian Penanganan Masalah-Masalah Sosial khususnya Anak dan Perempuan. Tujuan Kajian (1) untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam upaya penanganan masalah sosial; (2) untuk mengetahui upaya apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam menangani permasalahan-permasalahan sosial;

Metode kajian, lokasi survey di empat kecamatan di kabupaten Probolinggo ditentukan oleh pemerintah daerah dengan pertimbangan kecamatan tersebut potensi permasalahan sosial. Masing-masing kecamatan 50 responden dengan metode acak. Pengambilan data dengan metode wawancara dan analisis dengan metode diskriptif.

Hasil kajian (1) Kendala umum yang dihadapi dalam upaya penanganan masalah sosial perempuan adalah (a) pola pikir bahwa permasalahan yang dihadapi adalah urusan domestik rumah Tangga. (b) budaya patriarki yang menempatkan laki laki lebih superior dibanding perempuan (c) permasalahan dalam rumah tangga adalah sebuah aib jika sampai orang lain tahu. (2) Kendala yang dihadapi dalam upaya penanganan permasalahan anak adalah (a) pola pikir orang tua yang kurang memahami hak-hak anak, (b) kondisi kemiskinan yang dialami orang tua menyebabkan peran orang tua dalam tumbuh kembang anak tidak bisa maksimal (c) pengaruh lingkungan terhadap tumbuh kembang anak sangat besar (d) peran pemerintah dan tokoh agama dan adat kurang maksimal; (3) upaya yang sudah dilakukan pemerintah daerah kabupaten Probolinggo adalah pengoptimalan kerja SKPD terkait, dengan para pemangku adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat umum dan pihak swasta yang menciptakan sinergitas yang harmonis dalam upaya menangani permasalahan sosial.

Kata Kunci: Sosial, Anak, Perempuan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ketika kemiskinan, kesenjangan sosial, pengangguran dan berbagai masalah sosial lain masih menjadi problem serius yang dihadapi bangsa Indonesia, salah satu persoalan sosial yang membutuhkan perhatian ekstra adalah permasalahan anak dan perempuan, baik anak-anak yang dilerantarkan (*neglect*) atau anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan (*child abuse*) maupun persoalan perempuan yang acapkali masih menjadi korban marginalisasi dan bias ideologi patriarkhis. Berbagai

permasalahan anak dan perempuan yang muncul mulai dari persoalan anak terlantar, kasus anak yang *drop out* dari sekolah, terjadinya kasus kematian anak-anak karena kekurangan gizi, anak yang terpaksa bekerja, berbagai kasus kekerasan terhadap anak, dan juga persoalan kemiskinan perempuan, *wife abuse*, pernikahan dini perempuan, dan lain sebagainya, itu semua adalah berbagai masalah sosial yang kerap terjadi dan belum tertangani hingga tuntas.

Permasalahan anak dan perempuan di berbagai daerah seringkali sangat kompleks, baik di tingkat makro maupun di tingkat mikro. Kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan yang seringkali lebih mementingkan bidang ekonomi dan produktivitas, tidak jarang malah melahirkan efek samping pembangunan yang tidak diinginkan.

Bagi Kabupaten Probolinggo, berbagai persoalan sosial yang dihadapi perempuan dan anak di atas, jika tidak segera ditangani, bukan tidak mungkin akan menghambat dan menjadi beban pembangunan. Pertama, adanya berbagai masalah sosial anak yang tidak terpenuhi haknya atau bahkan dilanggar haknya, niscaya akan menyebabkan masa depan pembangunan di Kabupaten Probolinggo menjadi terhambat karena kualitas sumber daya manusia yang bermasalah dan tidak berkelanjutan. Kedua, adanya berbagai masalah yang dihadapi kaum perempuan, baik karena korban marginalisasi maupun akibat bias ideologi patriarkhis, niscaya akan menyebabkan potensi sumber daya manusia yang ada menjadi timpang, dan bahkan kehilangan peluang untuk dikembangkan sebagai sumber daya pembangunan yang penting dan bermanfaat.

Rumusan Masalah

- Bagaimana kendala yang dihadapi dalam menangani masalah-masalah sosial di Kabupaten Probolinggo;
- Sejauh ini upaya apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam upaya menanganinya?

Tujuan Penelitian

- (1) untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam upaya penanganan masalah sosial;
- (2) untuk mengetahui upaya apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam menangani permasalahan sosial;

TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan: akar munculnya masalah sosial

Masalah sosial adalah masalah yang bersifat kompleks dan multi dimensional, yang nyaris ada di setiap masyarakat yang mendiami suatu wilayah. Masalah sosial sendiri bisa diartikan sebagai suatu kondisi yang terlahir dari sebuah keadaan masyarakat yang tidak ideal. Salah satu kondisi yang dianggap tidak ideal dalam masyarakat adalah kemiskinan. Oleh karena itu, kemiskinan seringkali dianggap

sebagai faktor yang menjadi pemicu utama munculnya masalah sosial di suatu daerah. Jadi bisa dikatakan kemiskinan adalah akar dari permasalahan sosial yang ada.

Kemiskinan sendiri didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan, diantaranya seperti sandang pangan dan papan. Namun seiring dengan perkembangan peradaban manusia, faktor penyebab kemiskinan tidak hanya dilihat dari faktor ekonomi, tapi juga sosial, budaya dan politik. Beberapa faktor yang menjadi penyebab seseorang terperangkap dalam kondisi kemiskinan antara lain adalah pengangguran dan tingkat pendidikan yang rendah. *Pengangguran* dipahami sebagai ketidakmampuan mengakses peluang kerja. Baik disebabkan keterbatasan kemampuan diri sendiri atau keterbatasan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Jika angka pengangguran tinggi, maka jumlah orang miskin juga semakin meningkat. Ketidakberdayaan memenuhi kebutuhan hidup dasar karena tidak memiliki pekerjaan guna mendapatkan penghasilan melahirkan tindakan adaptasi dari individu tersebut. Tindakan adaptasi yang dimaksud bisa bersifat positif bisa juga bersifat negatif. Adaptasi secara positif bisa ditempuh dengan meminimalkan pengeluaran (menggencangkan ikat pinggang) dan atau melakukan diversifikasi usaha. Sedangkan adaptasi secara negative biasanya dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma sosial dan norma agama, yaitu tindakan criminal (mencuri, mencopet dan tindakan criminal lainnya).

Selain pengangguran, Pendidikan juga dianggap sebagai faktor penyebab kemiskinan. Hal ini karena dengan tingkat pendidikan yang rendah, seseorang tidak banyak memiliki pilihan dalam hal pekerjaan. Pilihan pekerjaan menjadi sangat terbatas. Terlebih jika seseorang tersebut tidak mempunyai keahlian (skill), menjadikan posisi dandaya saing dalam kompetisi mendapatkan pekerjaan sangat lemah. Dengan kondisi yang demikian, sudah pasti akan sulit pula bagi seseorang itu untuk keluar dari zona kemiskinan.

Kemiskinan di Kab. Probolinggo

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi. Setidaknya ada 5 (lima) indikator penentu kemiskinan yaitu, tingkat pendidikan (ditandai dengan angka APM dan AMH), tingkat kesehatan (ditandai dengan angka AKI dan AKB serta prevalensi Balita gizi buruk), sarana infrastruktur dasar (ditandai dengan jumlah MCK dan sumber air bersih), ketenagakerjaan (jumlah angkatan kerja) dan ketahanan pangan.

Menurut catatan BPS, pada tahun 2015 di Kabupaten Probolinggo masih terdapat kelompok keluarga pra sejahtera yaitu sebanyak 104.103 keluarga. Jumlah ini tidak mengalami perubahan dari tahun 2014. Adapun keberadaan keluarga pra sejahtera ini terkonsentrasi di Kecamatan Paiton yaitu sebanyak 9.049 keluarga pra sejahtera. Kecamatan lain yang juga menjadi kantong kemiskinan di Kabupaten Probolinggo adalah Kecamatan Gading, Pajarakan dan Kotaanyar di mana masih

terdapat sebanyak 8.956 keluarga pra sejahtera di Gading, 8.129 di Kotaanyar dan 8.075 keluarga pra sejahtera di Kecamatan Pajarakan.

Jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Probolinggo, ke empat kecamatan ini memiliki keluarga pra sejahtera yang jumlahnya terlihat sangat timpang. Ketimpangan antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya ini bisa disebabkan karena antara lain jumlah konsentrasi penduduk yang tidak merata dan juga kegiatan program pembangunan yang tersentralisasi di daerah-daerah dekat dengan pusat kegiatan pemerintahan. Sehingga secara geografis daerah yang jauh dari pemerintahan ini sulit mengakses berbagai hasil pembangunan karena jarak keterisolasian dari pusat pemerintahan.

Trend jumlah penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Akan tetapi yang terpenting dari penurunan jumlah penduduk miskin adalah diikuti pula dengan menurunnya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan sehingga kita tidak terjebak pada persoalan pengurangan kemiskinan saja. Akan sangat berbahaya jika menurunnya angka kemiskinan tidak disertai penurunan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan yang artinya masyarakat akan terpolarisasi secara tajam ke dalam masyarakat sangat miskin dan sangat kaya.

Berdasarkan data BPS, kondisi yang terjadi di Kabupaten Probolinggo penurunan jumlah penduduk miskin ternyata juga diikuti oleh penurunan indeks kedalaman kemiskinan. Artinya berkurangnya penduduk miskin disertai dengan peningkatan kesejahteraan penduduk yaitu dengan meningkatnya kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhannya dengan semakin mendekati garis kemiskinan.

Demikian dengan kondisi indeks keparahan kemiskinan yang menurun seiring dengan menurunnya angka kemiskinan. Artinya antara penduduk yang satu dengan yang lain tidak terjadi ketimpangan dalam pengeluaran. Dengan menurunnya kedua indeks ini seiring dengan menurunnya angka kemiskinan merupakan sinyal positif bahwa pengentasan kemiskinan yang dilakukan tidak hanya mengurangi penduduk miskin tetapi juga mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

METODOLOGI

Lokasi survey di empat kecamatan di kabupaten Probolinggo dengan masing-masing kecamatan 50 responden dengan metode acak. Pengambilan data dengan metode wawancara dan analisis dengan metode diskriptif.

Protet Permasalahan Sosial

Dari hasil survey yang dilakukan terhadap 200 responden dari keluarga miskin, di 4 (empat) kecamatan yang telah ditentukan, yaitu Kecamatan Sumberasih, Leces, Tegalsiwalan dan Banyuanyar, didapat beberapa fakta sebagai berikut:

Karakteristik dan Kondisi Keluarga

Secara umum, keluarga yang diteliti adalah keluarga miskin dan bahkan

sebagian di antaranya sangat miskin. Studi ini menemukan karakteristik keluarga miskin yang ditandai dengan

- Rendahnya tingkat pendidikan dan tak berkahlian (22% tidak bersekolah, 59 % berpendidikan SD dan 19 %, 13% SMP dan 6% SMA),
- Umumnya mereka bekerja serabutan (49%), bekerja di sektor pertanian (41%) dan industry kecil dengan penghasilan dan upah yang rendah(10%)

Rendahnya tingkat pendidikan yang terdapat pada keluarga miskin tersebut semakin mempersulit posisi mereka untuk bisa keluar dari zona kemiskinan yang mereka tempati selama ini. Pola pikir bahwa pendidikan bukan dianggap sesuatu yang penting melainkan dianggap sebagai beban hidup yang mahal mengakibatkan pendidikan bukan menjadi prioritas dalam pembelanjaan uang keluarga. Oleh sebab itu banyak diantara mereka yang harus putus sekolah untuk kemudian terpaksa masuk ke dalam dunia kerja. Akibat rendahnya pendidikan dan tidak adanya keahlian menjadikan mereka sulit menerobos dan melakukan mobilitas vertikal secara signifikan karena sebab-sebab yang sifatnya structural.

Rendahnya tingkat pendidikan dan tak punya keahlian, menyebabkan pilihan pekerjaan mereka menjadi sangat terbatas. Banyaknya warga miskin yang bekerja di sektor informal (serabutan) dengan upah yang kecil, sementara beban biaya hidup yang semakin tinggi, menjadikan posisi perekonomian keluarga miskin tersebut semakin terpuruk

Tekanan dan Ketahanan terhadap kemiskinan

Bertahan pada situasi dan kondisi miskin memang tidak mudah. Jangankan untuk memenuhi kebutuhan sekunder, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang sifatnya 'harus' (kebutuhan primer) saja mereka sulit. Kondisi ini semakin menjadi bila terjadi musibah misalnya ada salah satu anggota keluarga yang sakit, maka keluarga miskin ini akan semakin jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan. Alih alih punya tabungan, untuk biaya hidup sehari-hari saja terkadang masih kurang, sehingga bila ada kejadian luar biasa tidak ada cara lain yang bisa ditempuh selain berhutang. Tidak adanya agunan dan ingin proses yang cepat, biasanya mereka berhutang pada tetangga atau saudara yang lebih mampu secara ekonomi. Tetapi hal itu tidak banyak dilakukan karena pada umumnya mereka ada pada kondisi yang sama. Jalan satu-satunya adalah meminjam ke rentenir dengan bunga yang tinggi. Bisa ditebak selanjutnya kemana arah perkembangan perekonomian mereka jika sudah berhubungan dengan rentenir.

Permasalahan Anak dan Perempuan

Berdasarkan Buku Panduan Kementerian Sosial RI Tahun 2013 telah ditentukan secara Nasional terdapat 26 jenis PMKS. Namun pada studi ini akan difokuskan pada permasalahan anak dan perempuan.

Permasalahan Anak

Permasalahan anak pada umumnya dikategorikan kedalam tiga konsep, yaitu

perlakuan salah terhadap anak atau PSTA (Child abuse atau Child maltreatment), penelantaran anak (Child neglect) dan eksploitasi anak (*Child Exploitation*).

Permasalahan yang seringkali muncul dan dihadapi anak adalah anak terlantar, anak nakal, anak dengan masalah hukm dan anak jalanan. Kondisi anak semacam itu biasanya merupakan dampak dari kesulitan perekonomian yang dihadapi orang tua anak. Sehingga mengakibatkan tumbuh kembang anak terganggu dan melahirkan persoalan persoalan sosial seputar anak. Hak anak yang seharusnya diterima sejak dini adalah hak memperoleh kesehatan dan pendidikan yang semestinya. Namun bagi kebanyakan keluarga miskin, 2 (dua) hak dasar ini seringkali terabaikan karena dianggap sebagai beban pengeluaran yang kalau bisa tidak perlu dikeluarkan.

Kondisi Kesehatan Anak

Banyak kajian yang membuktikan bahwa keluarga yang memiliki anak balita adalah yang akan sering menderita sakit. Karena secara fisik daya tahan tubuh anak balita relative lebih rendah dibanding orang dewasa. Namun dalam penelitian ini justru ibu adalah individu yang sering sakit. Jika ibu sakit, maka bisa dipastikan pekerjaan domestic rumah yang selama ini dibawah kendali ibu akan terbelengkalai. Dampaknya sudah pasti dirasakan anak anak sebagai bagian anggota keluarga, terutama balita yang belum bisa mengurus sendiri keperluannya.

Jika salah satu anggota keluarga miskin sakit, masih ada di antara mereka yang mengobatinya sendiri. Tentu saja hal ini terkait dengan biaya pengobatan yang cukup mahal. Sebagian lagi memanfaatkan program pemerintah berupa kartu Jamkesmas dan Jamkesda. Namun hal itu tidak serta merta bisa meringankan beban keluarga yang sakit. Terutama jika yang sakit adalah kepala keluarga sebagai tulang punggung dalam mencari nafkah, maka kesulitan ekonomi tetap akan menimpa mereka.

Anak adalah individu yang masih terus tumbuh dan berkembang. Agar tumbuh kembang anak, terutama balita sesuai dengan KMS (Kartu Menuju Sehat) maka asupan gizi yang diterima harus baik dan sesuai dengan program empat sehat lima sempurna. Namun kajian ini menemukan fakta, jangankan memperoleh makanan sehat, frekuensi makan sehari hari saja tidak menentu. Kadang bisa 2-3 kali sehari. Tapi tidak menutup kemungkinan cuma bisa makan sehari sekali.

Kondisi Pendidikan Anak

Pendidikan adalah hak dasar yang harus diterima anak, sesuai amanat UUD 1945 pasal 31. Bahkan APBD dan APBN mengalokasikan dana sekitar 20% di bidang pendidikan. Namun implementasi kebijakan pemerintah ini banyak mengalami kendala bila sudah berhadapan dengan masyarakat miskin. Anak anak teraksa harus menanggung beban tidak dapat dipenuhi haknya bersekolah karena berbagai alasan. Bahkan untuk bisa menuntaskan jenjang Sekolah Dasar pun tidak jarang mereka tidak bisa dan harus putus di tangan jalan.

Berikut beberapa alasan yang dikemukakan yang menyebabkan anak putus sekolah.

Tabel 1
Faktor penyebab anak putus sekolah

Apakah ada anak responden yang putus sekolah di tengah jalan sebelum lulus SD?	Ya, ada Tidak ada	13,4% 86,6%
Apakah ada anak responden yang putus sekolah di tengah jalan sebelum lulus SMP?	Ya ada Tidak ada	14,6% 85,4%
Jika ada, apa faktor utama yang menjadi penyebab anak responden terpaksa putus sekolah?	Lokasi sekolah jauh	0
	Anak terpengaruh teman hingga memilih putus sekolah.	7,1%
	Anak terpaksa harus bekerja membantu orang tua.	42,9%
	Tidak memiliki biaya untuk melanjutkan pendidikan anak	50,0%

Di samping beberapa alasan di atas, bagi keluarga miskin tentang faktor penyebab anak-anak dari keluarga miskin terpaksa putus sekolah, sudah barang tentu bermacam-macam. Namun demikian, faktor yang paling sering menjadi penyebab anak putus sekolah anak berkaitan dengan fungsi dan peran anak sebagai salah satu sumber pendapatan strategis bagi keluarga. Sebanyak 42,9% responden menyatakan bahwa anak mereka terpaksa putus sekolah karena harus membantu orang tua bekerja. Selain itu, faktor penyebab lain anak terpaksa putus sekolah adalah karena tidak memiliki biaya untuk melanjutkan sekolah (50%), dan karena pengaruh teman sebaya yang sama-sama putus sekolah (7,1%). Bisa disimpulkan bahwa pendidikan bukan sesuatu yang penting bahkan dianggap sebagai beban karena harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Tabel 2
Hal yang Dirasa Memberatkan Ketika Harus Membiayai Pendidikan Anak

Hal yang Memberatkan	Sangat Memberatkan	Memberatkan	Cukup Memberatkan	Tidak Memberatkan	Jumlah
Uang saku/jajan anak di sekolah	33 (18,4%)	28 (15,6%)	37 (20,7%)	81 (45,2%)	179 (100%)
Transportasi ke sekolah	21 (11,7%)	27 (15,1%)	32 (17,9%)	99 (55,3%)	179 (100%)
Uang seragam	30 (16,8%)	37 (20,8%)	45 (25,2%)	66 (37,1%)	178 (100%)
Uang untuk membeli peralatan sekolah	32 (17,8%)	36 (20,0%)	47 (26,1%)	65 (36,1%)	180 (100%)
Uang pratikum	40 (23,1%)	29 (16,8%)	48 (27,7%)	56 (32,4%)	173 (100%)
Biaya ekstra kurikuler	45 (25,6%)	23 (13,1%)	53 (30,1%)	55 (31,2%)	176 (100%)

Di mata masyarakat miskin, ketika dalam dunia nyata mereka tidak melihat adanya perbedaan yang signifikan antara masa depan anak-anak yang hanya lulus SD atau SMP dengan anak yang bersekolah hingga tamat SMA atau lulus Perguruan Tinggi sekalipun, sesungguhnya bisa dipahami jika yang menjadi pilihan pada

akhirnya adalah mencari cara lain untuk memastikan masa depan anak tanpa mengandalkan pada bekal pendidikan anak yang cukup.

Perlindungan Anak

Salah satu kebutuhan dan hak dasar anak sesungguhnya adalah memperoleh kesempatan untuk tumbuh-kembang secara wajar dan dilindungi dari berbagai kemungkinan menjadi korban *neglect* dan *abuse* dari orang-orang dewasa di sekitarnya, termasuk tidak menjadi korban eksploitasi yang merugikan masa depan mereka. Tetapi, di kalangan keluarga miskin, alih-alih dipenuhi dan dilindungi dari kemungkinan menjadi korban *abuse*, anak-anak dari keluarga miskin sering terjadi justru menjadi objek eksploitasi dan perlakuan salah karena berbagai alasan.

Dalam kenyataan, anak-anak miskin seringkali menjadi korban pertama yang paling menderita ketika terjadi perubahan sosial dan tekanan kebutuhan hidup yang menjejalkan. Ketika kehidupan dan kondisi keuangan keluarga miskin sedang bermasalah, maka jangan kaget jika pada akhirnya hak-hak anak, sebagian atau seluruhnya terpaksa dilanggar atau tidak dipenuhi karena faktor-faktor yang sifatnya struktural.

Dalam proses pengasuhan anak sehari-hari, studi ini menemukan bahwa anak-anak dari keluarga miskin umumnya rawan menjadi korban *abuse* orang tuanya. Seperti dikatakan Siti Fatimah (1992) bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya *child abuse* adalah faktor ekonomi.

Di kalangan keluarga miskin, bentuk *child abuse* yang paling populer adalah *verbal abuse*, yaitu sikap orang tua yang memarahi anak dengan keras secara verbal, seperti memaki atau membentak (25,4%). Berikut tabel bagaimana orang tua memperlakukan anak:

Tabel 3
Apa yang Dilakukan Responden Ketika Anak Dinilai Berbuat Nakal

Yang Dilakukan Ketika Anak Nakal	Sering	Kadang-kadang	Tidak Pernah	Jumlah
Menasehati	155 (78,7%)	28 (24,2%)	14 (7,1%)	197 (100%)
Memarahi dengan keras secara verbal	49 (25,4%)	42 (21,8%)	102 (52,8%)	193 (100%)
Mencubit	8 (4,3%)	28 (15,2%)	148 (80,4%)	184 (100%)
Menyendul kepalanya	2 (1,0%)	6 (3,1%)	186 (95,9%)	194 (100%)
Menampar/memukul dengan tangan	6 (3,1%)	9 (4,7%)	178 (92,2%)	193 (100%)
Memukul dengan benda tertentu	4 (2,1%)	12 (6,2%)	178 (91,7%)	194 (100%)
Menendang	1 (0,5%)	8 (4,3%)	179 (94,7%)	188 (100%)
Mengurung	1 (0,5%)	4 (2,1%)	183 (97,3%)	188 (100%)
Menghajarnya	2 (1,0%)	9 (4,8%)	177 (94,1%)	188 (100%)

Data lain menyebutkan bahwa banyak anak-anak dari keluarga miskin yang terpaksa sudah harus masuk dalam dunia kerja. Seperti kita ketahui bahwa secara fisik dan mental (Psikologis) anak-anak adalah sangat lemah. Keterlibatannya dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja domestik maupun pekerja di sektor public sebetulnya akan cenderung rawan menjadi korban eksploitasi, terkadang berbahaya bahkan tidak mustahil dapat mengganggu perkembangan fisik, psikologis dan sosial

anak. Namun hal itu tidak menjadi kekhawatiran orang tua. Bagi mereka, anak yang terlibat dalam ekonomi produktif tidak lagi membebani mereka, justru bisa membantu menambah penghasilan keluarga. Jadi ada tiga (3) faktor yang utama yang memaksa anak harus bekerja: (1) eksploitasi yang lahir dari kemiskinan, (2) kurangnya pendidikan yang relevan serta tradisi dan ketiga (3) pola sosial yang menempatkan anak pada psosisi rentan.

Di Kabupaten Probolinggo ditemukan anak-anak dari keluarga miskin yang sudah bekerja ketika mereka berusia 11-12 tahun. Kondisi anak-anak di kabupaten Probolinggo bisa dilihat dari tabel di bawah ini. Tabel di bawah ini akan menjelaskan betapa penting dan startegis posisi anak, dalam upaya meningkatkan perekonomian keluarga. Juga tergambat betapa banyak ha-hak anak yang harus dikorbankan demi memaksa anak untuk ikut serta dalam upaya memperbaiki perekonomian keluarga.

Tabel 4
Keterlibatan Anak Dalam Kerja

Apakah ada anak responden yang saat ini bekerja?	Ya, ada	33,1%
	Tidak ada	69,9%
Umur anak responden ketika pertama kali bekerja (66 responden)	<11 tahun	6,1%
	11-12 tahun	12,1%
	13-14 tahun	13,6%
	15-16 tahun	24,2%
	17-18 tahun	44,0%
Jika ada anak yang bekerja, mereka bekerja di rumah sendiri membantu orang tua atau bekerja di orang lain?	Bekerja membantu orang tua	47,0%
	Bekerja di orang lain	28,8%
	Bekerja membantu orang tua dan juga bekerja di orang lain	24,2%
Rata-rata setiap hari berapa lama anak bekerja	<3 jam	7,6%
	3-4 jam	22,7%
	5-6 jam	13,6%
	7-8 jam	33,3%
	>8 jam	22,7%
Saat ini, apakah anak responden bekerja, sekolah atau masih keduanya? (147 responden)	Hanya sekolah	53,7%
	Sekolah dan bekerja	12,9%
	Hanya bekerja (putus sekolah)	19,0%
	Tidak keduanya	14,3%
Siapakah yang paling berinisiatif mendorong anak bekerja? (71 responden)	Anak sendiri	71,9%
	Ayah	7,0%
	Ibu	14,1%
	Teman-teman	7,0%
Apakah dalam setahun terakhir, keluarga responden pernah memperoleh bantuan dari pemerintah, baik Program Keluarga Harapan (PKH) atau program penanggulangan kemiskinan dan atau program perlindungan keluarga/anakyang lain, dalam bentuk bantuan uang tunai (179 responden)	Ya, pernah	62,0%
	Tidak pernah	38,0%

Sumber : Analisis Data Primer

Permasalahan Perempuan

Harus diakui bahwa usaha untuk mewujudkan keberdayaan perempuan bukanlah hal yang mudah. Di berbagai daerah, seringkali masih dihadapi kondisi perempuan yang menjadi korban ideologi patriarkhis dan menghadapi berbagai perlakuan diskriminatif yang merugikan posisi perempuan. Dari hasil kajian lapangan diketahui bahwa di Kabupaten Probolinggo, paling-tidak ada tiga persoalan utama yang membelit perempuan. Pertama, adalah masih tingginya kasus pernikahan dini anak perempuan. Kedua, adalah adanya diskriminasi upah antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan. Ketiga, KDRT.

Selain isu utama tersebut berbagai permasalahan yang juga membelit perempuan antara lain adalah, akses perempuan terhadap permodalan terbatas dan akses terhadap pendidikan kurang terbuka. Bisa dilihat dalam tabel di bawah ini bagaimana perempuan mendapat perlakuan yang tidak adil.

Tabel 5
 Persoalan yang Kerap Dihadapi Perempuan

Persoalan yang Kerap Dihadapi Perempuan	Sering	Kadang-Kadang	Tidak Pernah	Jumlah
1. Pernikahan dini anak perempuan	40 (21,0%)	86 (45,0%)	65 (34,0%)	191 (100%)
2. KDRT yang dialami istri	6 (3,1%)	39 (20,2%)	148 (76,7%)	193 (100%)
3. Pendidikan anak perempuan dibedakan	14 (7,7%)	35 (19,2%)	133 (73,0%)	182 (100%)
4. Kesempatan kerja bagi perempuan terbatas	14 (8,0%)	41 (23,4%)	120 (68,6%)	175 (100%)
5. Akses perempuan pada sumber permodalan terbatas	16 (8,8%)	33 (18,2%)	132 (72,9%)	181 (100%)
6. Diskriminasi upah antara laki-laki dan perempuan	20 (10,9%)	35 (19,2%)	127 (69,8%)	182 (100%)

Sumber : Analisis Data Primer

Kalangan keluarga miskin, terutama, keterlibatan perempuan dalam pekerjaan di sektor publik, umumnya sangat fungsional dan membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarga. Dari 200 responden yang diwawancarai, 42,7% responden menyatakan peran perempuan dalam menyokong pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga termasuk besar, dan bahkan 15,1% responden menyatakan sangat besar. Hanya 21,6% responden yang menyatakan perempuan tidak berperan dalam membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarga.

Dalam keluarga miskin, posisi perempuan sebenarnya menempati posisi yang sangat penting. Karena tidak hanya menjalankan fungsi utama sebagai ibu rumah tangga yang bertanggungjawab terhadap permasalahan domestic rumah tangga, tapi juga berperan sebagai pencari nafkah.

Ada beberapa hal yang menyebabkan permasalahan perempuan sulit diatasi. (1) karena budaya patriarki yang menempatkan perempuan dibawah kekuasaan laki laki (2) karena permasalahan yang menimpa perempuan dalam koridor rumah tangga dianggap sebagai permasalahan domestic (3) permasalahan rumah tangga adalah permasalahan domestic yang tidak perlu ada yang tahu karena itu merupakan aib. Beberapa alasan itulah yang menjadikan setiap kasus yang kekerasan dan

ketidakadilan yang menimpa perempuan selalu tidak bisa muncul dipermukaan sehingga tidak ada penanganan yang semestinya.

UPAYA PENANGANAN PERMASALAHAN SOSIAL TERKAIT ANAK DAN PEREMPUAN DI KABUPATEN PROBOLINGGO

Seperti kita ketahui bahwa permasalahan sosial adalah sangat kompleks dan bersifat multidimensional. Sehingga penanganannya pun tidak bisa hanya dilakukan satu pihak. Harus ada sinergitas antar pemangku kepentingan di masyarakat. Kerjasama yang harmonis antara pemerintah, masyarakat dan kalangan swasta diharapkan mampu mengatasi permasalahan sosial yang ada di masyarakat sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera sebagaimana amanat UUD 1945.

Berikut Rencana Aksi yang bisa dilakukan guna menangani masalah sosial yang ada di Kab. Probolinggo.

Strategi Mewujudkan Perlindungan Anak

Anak adalah aset bangsa yang sangat berpengaruh dalam pembangunan suatu bangsa di masa depan. Karena anak adalah pemegang tongkat estafet pembangunan. Namun disisi lain, anak adalah kelompok masyarakat yang justru rentan terhadap permasalahan sosial yang ada di lingkungannya. Alih-alih sebagai pihak yang harus dilindungi, anak-anak seringkali menerima perlakuan kasar dan tindak kekerasan serta kejahatan. Oleh karena ini guna mewujudkan anak-anak yang sehat jasmani dan rohani guna mencapai hasil anak yang berkualitas dan guna menekan angka kekerasan pada anak ada 3 langkah/strategi yang perlu dikembangkan:

- a. Mengembangkan program-program pembangunan yang pro anak.
- b. Menegmbalikan hak hak anak
- c. Melindungi anak dari tindak kekerasan dan kejahatan

Untuk mewujudkan strategi tersebut, maka upaya-upaya yang dapat dilaksanakan adalah melalui beberapa indikator:

Indikator Umum

Dalam setiap kegiatan pembangunan anggaran adalah menjadi salah satu indikator demi tercapainya tujuan pembangunan. Dalam pengaloka siannya maka evaluasi dan monitoring terhadap program pembangunan yang berperspektif anak sangat dibutuhkan. Seluruh SKPD diharapkan berperan aktif dalam kegiatan ini. Berikutnya adalah melakukan kerjasama dengan Forum anak misalnya LSM-LSM baik yang resmi maupun yang tidak resmi (pekerja sosial mandiri) yang selama ini konsern terhadap permasalahan anak. Dengan demikian diharapkan memperoleh masukan untuk pengembangan program pro anak sehingga bisa bersinergi dengan pembangunan daerah. Agar semua program bisa berjalan efektif dan tepat sasaran, maka up-dating data terhadap kasus anak sangat dibutuhkan.

Indikator Hak Sipil dan Kebebasan

Sebagai salah satu komponen masyarakat, anak juga memiliki hak-hak yang seharusnya mendapatkan perlindungan yang semestinya. Namun dari beberapa kasus, posisi anak seringkali termarginalkan. Program yang dimaksud adalah hak anak untuk memperoleh akte kelahiran sebagai salah satu hak sipil anak. Sebagai salah satu sistem pencatatan yang ada pada sebuah negara, maka pencatatan kelahiran bersifat universal yang pada dasarnya merupakan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang. Akte kelahiran juga bisa menegaskan sebuah garis keturunan seorang anak. Disamping itu akte kelahiran merupakan dokumen yang sangat penting bagi keluarga. Lebih dari itu akte kelahiran mempunyai peran strategis terhadap perkembangan anak di masa depan. Sebagai kelengkapan administrasi dan bahan rujukan jika seorang akan mengurus dokumen penting lainnya.

Salah satu tujuan pembangunan adalah membangun kesejahteraan rakyat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Untuk mencapai itu semua komponen-komponen yang ada di dalam masyarakat juga harus berkualitas. Demikian juga halnya dengan anak. Maka guna mewujudkan anak-anak yang berkualitas, maka program pembangunan yang pro anak selanjutnya adalah dengan menggairahkan minat baca anak. Untuk itu perlu dibangun taman bacaan anak, perpustakaan keliling, taman pintar dan lain sebagainya. Dengan menggandeng pihak swasta untuk bisa berperan dalam lomba-lomba yang bisa meningkatkan kreatifitas anak.

Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Mewujudkan keluarga yang sejahtera adalah tujuan utama Pembangunan nasional. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk oleh perkawinan sah dan mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan Anak putus sekolah (drop out), anak jalanan, anak terlantar, anak berkebutuhan khusus, anak dengan permasalahan hukum, merupakan pekerjaan rumah yang sangat penting bagi pemerintah daerah. Langkah awal adalah dengan melakukan pendataan terhadap anak-anak yang masuk ke dalam pusaran masalah sosial. Dengan data yang valid dan up to date, maka diharapkan strategi yang ditetapkan juga efektif dan tepat sasaran. Selanjutnya, adalah dengan membangun kerja sama yang intensif dengan LSM-LSM yang ada, guna bersama-sama memecahkan masalah yang dihadapi misalnya melakukan konseling, rehabilitasi fisik maupun psikis dalam upaya menarik keluar anak-anak yang terlibat permasalahan sosial.materi yang layak. Seluruh anggota keluarga memiliki hubungan yang selaran, serasi dan seimbang dengan anggota keluarga sendiri, dengan masyarakat dan dengan lingkungan. Keluarga sebagai bagian terkecil komunitas masyarakat dalam sebuah negara mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya menciptakan manusia yang berkualitas. Boleh dikata keluarga adalah ujung tombak terciptanya masyarakat yang sejahtera. Anak sebagai bagian dari anggota keluarga memiliki hak yang sama dengan anggota keluarga yang lain yaitu menginginkan rasa aman dan nyaman dalam keluarga. oleh karena itu sebagai orang tua yang bertanggungjawab terhadap keberadaan keluarga harus mampu menciptakan

situasi yang kondusif terhadap tumbuh kembang anak baik fisik maupun psikis. Pemberian gizi yang baik terhadap anak dan pemberian ASI buat batita, adalah satu upaya meningkatkan kualitas anak secara fisik. Sedangkan pemberian pendidikan yang baik, pemberian pengetahuan agama yang baik merupakan upaya meningkatkan kualitas anak secara psikis. Apabila upaya-upaya di atas bisa dijalankan, maka permasalahan sosial menyangkut anak tentu saja bisa diminimalisir. Pemerintah sebagai motor penggerak pembangunan harus menyediakan sarana dan prasarana dan ikut pula memfasilitasi keberhasilan program keluarga sejahtera ini.

Hak Perlindungan Khusus

Hak perlindungan khusus diberikan kepada anak-anak yang terlanjur terjebak dan masuk dalam lingkaran permasalahan sosial dan hukum.

Strategi Pemberdayaan Perempuan

Tidak berbeda jauh dengan kondisi anak, posisi perempuan dalam masyarakat seringkali juga dianggap sebelah mata. Keberadaannya seringkali terabaikan dalam proses sosial yang terjadi di masyarakat. Sebagai kelompok sosial dalam masyarakat, posisi perempuan seringkali termaginalkan baik dalam proses pembangunan suatu wilayah maupun dalam proses pengambilan keputusan. Keberadaannya dianggap sebelah mata sehingga kontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dianggap tidak ada. Karena posisinya yang seperti itu perempuan seringkali mendapat perlakuan tidak adil. Melihat kenyataan di masyarakat yang seperti itu, maka program-program pembangunan sekarang ini banyak menitikberatkan dan upaya pemberdayaan perempuan. Strategi perlindungan dan pemberdayaan perempuan bisa dilakukan dengan:

- a. Mengembangkan kebijakan Perempuan
- b. Melindungi perempuan dari tindak kekerasan dan ketidakadilan
- c. Memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi perempuan untuk mengembangkan diri
- d. Mengikutsertakan peran perempuan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Untuk mewujudkan ke 4 strategi di atas, maka hal paling mendasar yang harus terealisasi adalah membuat produk-produk kebijakan yang pro perempuan. Selanjutnya mengikutsertakan seluruh komponen masyarakat dan pranata sosial untuk berpartisipasi aktif dalam pengejawantahan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. Aktifitas lain yang mampu mendorong upaya pemberdayaan perempuan adalah peran aktif PKK sebagai wadah organisasi perempuan yang paling memasyarakat dan bekerja sama dengan instansi-instansi terkait (Dinkes, Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Depag dan lain-lain) untuk melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pemberian kursus ketrampilan.

Sosialisasi dan penyuluhan terkait dengan posisi perempuan yang sering mendapat perlakuan tidak adil yaitu KDRT, terkait pula peran perempuan sebagai Ibu yang harus bisa berperan dalam menjaga kesehatan anggota keluarga (sosialisasi

pola hidup sehat dan pengolahan makanan sehat). Sementara itu pemberian kursus ketrampilan yang dimotori oleh dinas perindustrian adalah dalam upaya pemberdayaan perempuan. Hal ini dibutuhkan karena banyak perempuan seringkali ikut berperan dalam mencari nafkah membantu suami. Pengenalan dan Pengembangan usaha mikro mungkin bisa menjadi alternatif para perempuan mendapatkan penghasilan. Bantuan modal tanpa agunan bisa jadi jalan keluar menumbuhkan usaha mikro dikalangan perempuan, terutama dalam keluarga miskin.

KESIMPULAN & REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian Rencana Aksi Daerah Penanganan Masalah Sosial di Kabupaten Probolinggo, maka bisa disusun kesimpulan sebagai berikut:

1. Permasalahan Sosial bersifat kompleks dan multidimensional. Oleh karena itu dalam upaya penanganannya dibutuhkan sinergitas antar banyak pihak, yaitu pemerintah dan seluruh komponen masyarakat sehingga segera tercipta masyarakat yang sejahtera.
2. Permasalahan Sosial terutama terkait anak dan perempuan, umumnya terjadi pada keluarga dengan status sosial pra sejahtera (miskin)
3. Permasalahan Sosial yang menimpa anak umumnya adalah penelantaran anak, perlakuan salah terhadap anak (pola asuh dan pola didik yang salah, yaitu dengan kekerasan baik verbal, fisik maupun mental) , eksploitasi anak (memperkerjakan anak guna mendapat keuntungan ekonomis dan pernikahan dini) dan pemutusan hak-hak anak (anak putus sekolah, kondisi kesehatan anak yang kurang diperhatikan, hak-hak sipil anak terabaikan)
4. Kendala yang dihadapi dalam upaya penanganan permasalahan anak adalah (1)pola pikir orang tua yang kurang memahami hak-hak anak, (2) kondisi kemiskinan yang dialami orang tua menyebabkan peran orang tua dalam tumbuh kembang anak tidak bisa maksimal (3) pengaruh lingkungan terhadap tumbuh kembang anak sangat besar (4) peran pemerintah dan tokoh agama dan adat kurang maksimal.
5. Permasalahan Sosial yang menimpa perempuan umumnya adalah KDRT, pernikahan dini, diskriminasi perlakuan antara perempuan dan laki laki terkait upah yang diterima dalam bekerja.
6. Kendala umum yang dihadapi dalam upaya penanganan masalah social perempuan adalah (1) pola pikir bahwa permasalahan yang dihadapi adalah urusan domestic rumah Tangga. (2) budaya patriarki yang menempatkan laki laki lebih superior dibanding perempuan (3) permasalahan dalam rumah tangga adalah sebuah aib jika sampai orang lain tahu.
7. Monitoring dan Evaluasi Penanganan Masalah Sosial di Kabupaten Probolinggo adalah dengan upaya pengoptimalan kerja SKPD –SKPD terkait, dengan para pemangku adat , tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat umum dan pihak

swasta. Dengan demikian tercipta sinergitas yang harmonis dalam upaya menangani permasalahan social.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, rekomendasi bagi penanganan permasalahan social terkait anak dan perempuan adalah :

1. Mengembangkan program-program yang pro anak dan perempuan baik dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai payung hukum maupun implementasinya
2. Mengembalikan hak hak anak baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sipil dan hak hidup.
3. Melindungi anak dan perempuan dari tindak kekerasan dan kejahatan serta ketidakadilan
4. Mengikutsertakan peran perempuan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera
5. Meningkatkan peran SKPD, LSM dan seluruh elemen masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam upaya menangani masalah social anak dan perempuan
6. Mensosialisasikan program-program pro anak dan perempuan secara luas melalui Dinas Komunikasi dan Informasi, media massa lokal, baik cetak, radio, televisi maupun media on line
7. Selanjutnya Rencana Aksi Daerah ini bisa diwujudkan dalam implementasinya sehingga harapan terwujudnya masyarakat sejahtera dan berkeadilan bisa tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Made Sadhi, 1997, Selayang pandang Anak Sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana, Arena Hukum, Malang.
- Gultom, Maidin, 2010, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
- Huraerah, Abu. (2006). Kekerasan Terhadap Anak, Penerbit Nuansa, Emmy, Jakarta.
- Kartasasmita. Ginanjar, 1997. Kemiskinan, Balai Pustaka, Jakarta.
- Koentjaraningrat. 1997. Metode-metode Penelitian Masyarakat. Gramedia. Jakarta
- Rahmawati, Y. I. 2006 Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan <https://sarulmardianto.wordpress.com/2012/04/24/> (diakses pada tanggal 24 April 2012)

Penanganan Masalah Sosial Khususnya Permasalahan Anak Dan Perempuan Kabupaten Probolinggo Tahun 2017 (Koesriwulandari)

Soetrisno, Loekman. 1997. *Kemiskinan, Perempuan, dan Pemberdayaan*. Kanisius, Yogyakarta

Suyanto, Bagong. 2013. *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*. Malang: In-Trans Publishing
Creswell, John W., 2012, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.